JURNALISME LINGKUNGAN YANG SADAR LINGKUNGAN

Arief Fajar
Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: arf_manutd_2003@yahoo.co.id

ABSTRACT

In the principle, environmental journalism has same format to another journalism. However, the difference is a central issue in the news, coverage of environmental journalism focused on text production from the reality of environment such as the environmental damage caused of human error (pollution, flooding, landslides, and deforestation), local wisdom, conservation, waste, nature resource. According to categorization from Flournoy, environmental news consist of (Flournoy, 1989);

> *Peristiwa yang ditampilkan dalam teks berita yang terkait dengan Bencana Alam, Perubahan Iklim, Global Warming, Penipisan Lapisan Ozon, dan lain-lainya seperti pengembangan teknologi serta kebijakan pemerintah terkait lingkungan.*

Most people know about environmental degradation such as deforestation, pollution industrial waste and the greenhouse effect through newspapers and television. But most environmentalists are not satisfied with the environmental news in newspapers and on television. They cite three mistakes that often appear in the news environment, such as: lack of information relevant to the background news, headlines are often misleading and lack of desire to think of risk coverage. (Abrar, 1993:59-60). The main discussion in this paper, invites critical discussion about the concept of environmental journalism.

Keywords : Environmental Journalism Ethics.

ABSTRAK

Pada prinsipnya jurnalisme lingkungan hidup sama format jurnalisme yang lain. Namun, yang menjadi perbedaan adalah isu sentral dalam pemberitaan, jurnalisme lingkungan hidup menitiberatkan peliputan dan produksi teks berita pada realitas lingkungan hidup seperti; kerusakan lingkungan akibat olah tangan manusia (pencemaran, banjir, tanah longsor, penggundulan hutan), kearifan lokal, konservasi, limbah, penggunaaan sumber daya

alam. Berkaca dari kategorisasi pemberitaan menurut Flournoy, batasan pemberitaan lingkungan hidup (Flournoy, 1989) ,yaitu;

Peristiwa yang ditampilkan dalam teks berita yang terkait dengan Bencana Alam, Perubahan Iklim, Global Warming, Penipisan Lapisan Ozon, dan lain-lainya seperti pengembangan teknologi serta kebijakan pemerintah terkait lingkungan.

Sebagian besar masyarakat mengetahui kerusakan lingkungan hidup seperti penggundulan hutan, pencemaran sampah dan industri serta efek rumah kaca melalui surat kabar dan televisi. Tetapi sebagian besar ahli lingkungan hidup tidak puas dengan pemberitaan lingkungan hidup di surat kabar maupun di televisi. Mereka menyebutkan tiga kesalahan yang sering muncul dalam pemberitaan lingkungan hidup; seperti: tiadanya informasi yang relevan dengan latar belakang pemberitaan, judul berita yang sering menyesatkan dan tiadanya keinginan memikirkan dalam risiko pemberitaan. (Abrar, 1993:59-60). Bahasan utama dalam tulisan ini, mengajak kritis mengenai konsep jurnalisme lingkungan yang "betul-betul" sadar lingkungan.

Kata Kunci: Etika Jurnalisme Lingkungan Hidup

LATAR BELAKANG

Sebelum menulis makalah ilmiah ini, masih teringat pertanyaan salah satu mahasiswa di kelas paper; bagaimana sebenarnya kita melihat jurnalisme lingkungan hidup? Apakah jurnalisme ini yang menjadi akar jurnalisme bencana atau komunikasi bencana? Mengapa harus perspektif jurnalis begitu berbeda dalam meliput berita lingkungan hidup dan bencana?

Pertanyaan menggelitik, namun perlu sebuah pemikiran kritis untuk menjadikan mahasiswa tersebut paham. Makalah ini sebagai jawaban awal untuk memahami jurnalisme lingkungan terutama sadar lingkungan. Kemudian masih membekas diskusi kecil dengan jurnalis dari LPP TVRI mengenai gaya reportasi jurnalis Indonesia dengan jurnalis asing (terutama Jepang) mengenai peliputan berita lingkungan hidup terlebih bencana. Bahkan, beberapa konsep perbincangan ini menjadi topik dalam situs jejaring sosial dan media sosial lainnya.

Secara gamblang, kolega saya tersebut menjelaskan ada tiga perbedaan mendasar dalam gaya reportase lingkungan hidup terutama bencana. *Pertama*, dari sudut pandang manusia; manusia sebagai

korban lingkungan atau bencana selalu diletakkan sebagai objek ekspoitasi baik secara fisik maupun psikologis. Sedangkan jurnalis asing lebih melihat manusia sebagai penyeimbang alam dan mempunyai kewajiban melestarikan keberlanjutan.

Kedua, membungkus kasus lingkungan; jurnalis kita lebih cenderung memberikan hal-hal yang terlalu jauh dari isu lingkungan itu sendiri. Mulai dari mitos dan hal magis hingga mengaitkan pada isu yang sangat besar mengenai kiamat. Sedangkan jurnalis asing cenderung memberikan pola pikir atau kerangka berpikir bagaimana mampu bangkit dari keterpurukan bencana atau sekuensi berita lingkungan.

Ketiga, kekuatan dan keakuratan data; justru jurnalis lokal sering lalai untuk mencatat data-data penting mengenai lingkungan hidup. Bahkan data tidak valid tersebut cenderung data tersebut menjadi sumber utama dan sering dikeluhkan kebenarannya. Hal dipahami berbeda oleh jurnalis asing yang justru mengedepankan data untuk mampu memberikan laporan secara lebih *rapid*.

Hal di atas memang baru sebatas diskusi dan belum secara ilmiah dibuktikan secara riset. Namun, sebagai indikator dengan begitu banyaknya keluhan dari jurnalis sendiri serta masyarakat; maka perlu ada upaya merumuskan etika dan estetika jurnalisme lingkungan hidup yang sadar lingkungan. Bukan hanya sebatas etika jurnalisme baik cetak maupun elektronik, tetapi juga memberikan kesadaran akan pentingnya jurnalisme lingkungan sebagai tanggungjawab bersama.

Oleh karena itu, makalah ini mencoba menggagas sebuah pemikiran untuk melihat jurnalisme lingkungan lebih sadar lingkungan. Selain itu, menghimpun tanggapan secara akademis untuk memberikan beragam perspektif sadar lingkungan untuk peliputan yang lebih hijau. Sehingga, inilah yang menjadi acuan penulis melihat jurnalisme, dengan judul makalah ***"Jurnalisme Lingkungan yang Sadar Lingkungan".***

PEMBAHASAN

1. Jurnalisme Pembangunan, Jurnalisme Lingkungan Hidup dan Muara sebagai Jurnalisme Bencana

Jurnalisme pembangunan dianggap sebagai akar muara jurnalisme lingkungan hidup. Mengapa demikian? Isu-isu lingkungan hidup awalnya sering dianggap dekat dengan isu-isu pembangunan. Menurut Zulkarimein Nasution; isu lingkungan hidup dianggap

sebagai bagian *concern* dari pembangunan lewat komunikasi untuk pembangunan, sebagai contoh bagaimana penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam proyek FAO penanganan potensi kelaparan dan pertanian. (Nasution, 2007:233).

Isu-isu pembangunan ini menumbuhkan apa yang disebut jurnalisme pembangunan. Menurut Aggarwala (1980), Jurnalisme pembangunan merupakan peliputan pembangunan sebagai proses ketimbang peristiwa dan penekanan pada periodesasi pembangunan. Peliputan jurnalisme pembangunan secara kritis mengkaji, evaluasi dan memberitakan; (1) relevansi suatu proyek pembangunan dengan kebutuhan nasional dan yang terpenting kebutuhan lokal, (2) perbedaan antara program menurut rencananya dengan yang diimplementasikan, dan (3) perbedaan antara dampaknya terhadap masyarakat seperti yang diklaim dan kondisi sebenarnya. (Nasution, 2007:3)

Kemudian tumbuhlah isu lingkungan hidup sebagai bagian isu pembanguna. Sehingga, jurnalisme pembangunan pun hadir dengan format tambahan yaitu jurnalisme lingkungan hidup. Pada awal tumbuh jurnalisme lingkungan hidup hadir mengimplementasikan konsep jurnalisme pembangunan seperti yang disebutkan sebelumnya dengan *concern* utama pada isu-isu pembangunan dalam lingkungan hidup. Perkembangan selanjutnya, jurnalisme lingkungan hidup tidak hanya berbicara isu lingkungan di seputar pembangunan. Menurut Don Michael Flournoy, isu lingkungan hidup terkait dengan peristiwa seperti bencana alam, perubahan iklim, global warming, penipisan lapisan ozon, dan lain-lainya seperti pengembangan teknologi serta kebijakan pemerintah terkait lingkungan. (Flournoy, 1988)

Pada prinsipnya jurnalisme lingkungan hidup sama format jurnalisme yang lain. Namun, yang menjadi perbedaan adalah isu sentral dalam pemberitaan, jurnalisme lingkungan hidup menitiberatkan peliputan dan produksi teks berita pada realitas lingkungan hidup seperti; kerusakan lingkungan akibat olah tangan manusia (pencemaran, banjir, tanah longsor, penggundulan hutan), kearifan lokal, konservasi, limbah, penggunaaan sumber daya alam (Abrar, 1993). Sehingga, kita dapat memahami jurnalisme lingkungan sebagai jurnalisme konvensional lainnya yang harus taat etika dan menyampaikan faka tetapi bertitik tekan pada kasus linkungan hidup dan sadar etika lingkungan yaitu; (1) informasi

yang relevan dengan latar belakang kasus lingkungan, (2) materi berita yang sering menjernihkan situasi atau menjadi mediasi (dalam istilah McLuhan sebagai *extension of man*) dan (3) memperhatikan risiko pemberitaan dari kasus lingkungan hidup.

Selain itu, menurut Anderson (1997) materi jurnalisme lingkungan baik berita dan jurnalis wajib memiliki materi pengetahuan tentang lingkungan dan nilai budaya dari masyarakat atau kasus lingkungan tersebut. Dalam pandangan Anderson, jurang antara pengetahuan tentang lingkungan dan nilai budaya sekitar; sering menjadikan liputan lingkungan jauh dari kata memuaskan. Semisal; di pemberitaan di negara dunia ketiga, sering karya jurnalisme lingkungan memberikan *judgments* tertentu terhadap kondisi lingkungan yang sebenarnya akarnya adalah budaya masyarakat yang belum bisa dikatakan beradab (Anderson, 1997:199-200)

Perkembangan terakhir, jurnalisme lingkungan hidup memiliki varian tema yang lebih khusus yaitu jurnalisme bencana. Prakteknya tidak jauh berbeda dengan jurnalisme lingkungan hidup, tetapi sekali lagi banyak ketimpangan terutama etika dan kesadaran akan bencana yang masih sangat minim. Secara ideal telah banyak aturan resmi dimulai dari etika jurnalistik, UU Penyiaran hingga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). Apa yang dikeluhkan Alison Anderson dan Ana Nadya Abrar dalam peliputan jurnalisme lingkungan hidup juga terjadi dalam jurnalisme bencana.

Dasar utama adalah ada tiga kesalahan yang selalu muncul dalam peliputan bencana, yaitu: (1) minimnya informasi yang relevan dengan latar bencana, semisal banyak jurnalis yang salah memberikan lokasi bencanadan istilah bencana; (2) *headline* dan isi berita yang sering menyesatkan masyarakat di masa bencana; (3) rendahnya kesadaran akan risiko pemberitaan bencana, baik bagi masyarakat ataupun diri jurnalis sendiri.

2. Konstruksi Kepentingan Jurnalisme Lingkungan Hidup

Karya jurnalisme sangat dominan dalam bentuk teks berita, baik dalam karya cetak (media cetak), elektronik (audio dan audio visual) hingga dalam bentuk *online*. Secara tampilan dan gaya penulisan mempunyai kekhasan dan karakteristik tersendiri, tetapi secara isu sering mempunyai similaritas dari ketiga tipikalnya. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah teks berita sebagai karya utama jurnalisme tadi; sebab perlu diakui karya jurnalisme adalah realitas kedua.

Dalam bahasa sederhana seperti pendapat Eriyanto, bahwa karya jurnalisme lewat teks berita mengalami proses konstruksi yang sarat kepentingan. Dari hasil produksi teks berita inilah, media massa terkadang terlalu "berlebihan" dalam mengapresiasi tuntutan khalayak sebagai sumber informasi. Hal ini sering dikatakan sebagai orientasi media massa dimana dapat kita petakan dengan menilai *news value* (nilai berita) dari sebuah teks berita di media massa. Untuk itu akan sangat memudahkan memulai sebuah penilaian terhadap teks berita ketika berupaya memahami ukuran serta elemen yang digunakan oleh media massa dalam menilai sebuah peristiwa.

Elemen ini berhubungan dengan orientasi media dengan khalayaknya. Menurut Shoemaker dan Reese, nilai berita adalah elemen yang ditujukan kepada khalayak yang merupakan prosedur standar peristiwa apa yang bisa disebarkan kepada khalayak. (Eriyanto, 2002: 105)

Selain itu, nilai berita adalah produk dari konstruksi wartawan yang dianggap ideologi profesional wartawan dimana memberi prosedur bagaimana peristiwa yang begitu banyak disaring dan ditampilkan. Secara umum, nilai berita dapat dipecah sebagai berikut:

a. ***Prominance,*** nilai berita diukur dari kebesaran peristiwanya atau arti pentingnya.
b. ***Human Interest,*** peristiwa lebih memungkinkan disebut berita kalau peristiwa itu lebih banyak mengandung unsur haru, sedih, dan menguras emosi khalayak.
c. ***Conflict/Controversy,*** peristiwa yang mengandung konflik lebih potensial disebut berita dibandingkan dengan peristiwa biasa-biasa saja. ***Unusual,*** berita mengandung peristiwa yang tidak biasa, peristiwa yang jarang terjadi.
d. ***Proximity,*** peristiwa yang dekat lebih layak diberitakan dibandingkan dengan peristiwa yang jauh, baik dari fisik maupun emosional dengan khalayak.

Dalam pandangan penulis, nilai berita tersebut merupakan menjadi standar utama dari konstruksi atas realitas dari karya jurnalisme termasuk dalam menyajikan pemberitaan bertema lingkungan hidup. Hal ini yang sering menghasilkan kontraproduktif ketika dibenturkan dengan etika jurnalisme secara umum. Orientasi yang berbeda dari kedua aspek harapan pasar dan kewajiban taat etika menghasilkan karya jurnalisme menghasilkan keberpihakan cenderung pada pasar, karena lebih berlandas keberlanjutan dari

institusi pencetak karya jurnalisme sendiri. Dalam bahasa media sering dianalogikan sebagai rating dan oplah demi kelanggengan institusi media.

Hal ini juga sejalan dengan kondisi pada jurnalisme lingkungan hidup. Wacana pemberitaan berita lingkungan dipengaruhi oleh kombinasi faktor spatial, temporal dan kultural. Pada pemberitaan lingkungan hidup, hal ini dapat kita lihat secara mudah. Sebagai contoh; peliputan bencana yang hadir sebagai drama kehidupan yang penuh darah dan gelimpangan ketimbang menghadirkan liputan berisi data mengenai *content* bencana. Banyak sekali kesalahan data dengan menghadirkan prediksi-prediksi yang sering tanpa dasar, bahkan berlomba-lomba memberikan berita non faktual yang lebih tidak jelas sumbernya. Hal ini dperparah dengan masuknya infotainment dalam mengekploitasi berita tentang lingkungan hidup terutama bencana.

Dalam ranah jurnalisme ideal saja, masih diragukan apakah infotainment sebagai praktik jurnalitik. Meskipun belakangan hadir klaim sepihak dari beberapa penyelenggara tayangan infotainment menyebut diri mereka sebagai penggiat atau pelopor jurnalisme infotainment, namun prakteknya jauh dari jurnalisme. Dalam kasus bencana, beberapa kali tayangan infotainment memberikan gambaran yang salah mengenai bencana. Kasus terakhir ditariknya tayangan infotainment *Silet* dan hujatan kepada presenter tayangan tersebut, karena dianggap terlalu berlebihan menyampaikan kabar mengenai letusan gunung Merapi. Sehingga, isu lingkungan hidup terutama bencana tidak hanya lagi berbicara content isu, tetapi menjadi komodifikasi akibat atas nama rating dan oplah. Konstruksi dan wacana lingkungan hidup diseleksi sebagai komoditas yang menjual atau dalam istilah Mosco transformasi nilai guna menjadi nilai tukar.

3. Etika Jurnalisme dan Pengolahan Berita Lingkungan Hidup

Hakekat utama jurnalisme ialah menyediakan informasi yang komprehensif kepada warga atau masyarakat. Sebagai muaranya, informasi tadi mampu memberikan gambaran pola pikir atau mendidik masyarakat untuk mengatur hidupnya secara lebih baik dan harmonis. Hal ini sebagai tuntutan perluasan jaringan kebutuhan ruang dan waktu dari masyarakat itu sendiri. Sehingga, kegiatan atau praktek jurnalisme harus sangat memperhatikan penerimaan khalayak atau lebih luas masyarakat. Selain itu, praktek jurnalisme sangat perlu diiringi dengan kesadaran akan tanggungjawab profesi dan etika.

Berkaca pada pendapat Amar (1984), praktek jurnalisme berkualitas adalah memilih atau menyajikan karya jurnalistik yang etis, moralis, dan intelek. (Sumadiria, 2005:39). Tuntutan utama menjadi berkualitas sangat ditentukan dari tanggungjawab dari penyelenggara kegiatan jurnalisme terhadap masyarakat dan etika profesional mereka sendiri. Sebagai awalan, para jurnalis secara etika terikat dengan apa yang disebut prinsip jurnalisme secara universal atau sembilan elemen jurnalisme (Kovach dan Rosanstiel, 2004:8) yaitu;

a. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran.
b. Loyalitas pertama jurnalisme kepada warga.
c. Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi.
d. Para praktisi harus menjaga independensi terhadap sumber berita.
e. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan.
f. Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga.
g. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting dan relevan.
h. Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional.
i. Para praktisi harus diperbolehkan mengikuti hati nurani mereka.

Prinsip dasar jurnalisme di atas jelas dapat dipakai menjadi acuan bagaimana menyelenggarakan praktek atau kegiatan jurnalisme. Secara makro elemen di atas tetap memperhatikan keberlanjutan dan keberlangsungan usaha praktek jurnalisme. Sehingga, untuk membedakan praktek jurnalisme yang berkualitas dengan yang *abal-abal*; sebenarnya sangatlah mudah. Ada etika yang menjadi pegangan, yang berlaku baik dalam bentuk cetak, elektronik, dan *online*.

Selain, sembilan prinsip jurnalisme di atas; sebetulnya Indonesia memiliki beragam etika dan peraturan tertulis mengenai kegiatan jurnalisme. Mulai dari kode etik wartawan baik cetak (PWI dan AJI) maupun elektronik, UU Pokok Pers No. 40 tahun 1999, UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, hingga Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). Perangkat etika dan aturan diharapkan memberikan ruang gerak jurnalisme berjalan sesuai koridornya.

Selanjutnya bagaimana rangkain etika di atas mengatur kegiatan jurnalisme lingkungan hidup terutama jurnalisme bencana, diantaranya sebagai berikut;

a. Pasal 6 UU No 40 tahun 1999 Pokok Pers;

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

b. Pasal 5 UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;

   Penyiaran diarahkan untuk:

   - Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;

c. Pasal 34 tentang Peliputan Bencana Alam dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;

   Dalam meliput dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah, lembaga penyiaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

   - Melakukan peliputan subyek yang tertimpa musibah harus mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya;
   - Tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya; dan/atau
   - Menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan;

d. Pasal 55 tentang Peliputan Bencana Alam Dan Musibah dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran;

   Program siaran peliputan bencana alam atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga dan/atau masyarakat yang terkena bencana alam.

e. Pasal 56 tentang Peliputan Bencana Alam Dan Musibah dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran;

   Program siaran peliputan bencana alam atau musibah dilarang:

- Menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga dan masyarakat yang terkena bencana alam dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
- Menampilkan saat-saat menjelang kematian;
- Mewawancara anak dibawah umur sebagai narasumber dalam kejadian bencana alam;
- Menampilkan gambar korban atau mayat secara detil (*big close up, medium close up, extreme close up*); dan/atau
- Menampilkan gambar luka tingkat berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.

Sehingga secara etika dan aturan, peliputan dan pengolahan teks berita jurnalisme lingkungan hidup telah diatur dengan baik. Kesadaran jurnalis dan penyelenggara praktek jurnalisme masih harus ditekan untuk sadar lingkungan. Selain itu, ada lima hal yang menjadi dasar utama dalam jurnalisme lingkungan yaitu; 1) informasi yang relevan dengan latar belakang kasus lingkungan, (2) materi berita yang sering menjernihkan situasi atau menjadi mediasi, (3) memperhatikan risiko pemberitaan dari kasus lingkungan hidup, (4) pengetahuan tentang lingkungan, dan (5) nilai budaya dari masyarakat atau kasus lingkungan.

KESIMPULAN

Masalah pokok pada *paper* ini yaitu keberadaan jurnalisme lingkungan hidup yang harusnya sadar lingkungan. Dari deskripsi dalam pembahasan *paper* ini dapat dihasilkan tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Jurnalisme lingkungan hidup yang ada sering memunculkan tiga kesalahan berikut, yaitu: (a) minimnya informasi yang relevan dengan latar bencana, semisal banyak jurnalis yang salah memberikan lokasi bencanadan istilah bencana; (b) *headline* dan isi berita yang sering menyesatkan masyarakat di masa bencana; (c) rendahnya kesadaran akan risiko pemberitaan bencana, baik bagi masyarakat ataupun diri jurnalis sendiri.
2. Wacana pemberitaan berita lingkungan dipengaruhi oleh kombinasi faktor spatial, temporal dan cultural yang menjadi konstruksi dan komodifikasi.
3. Penyelenggaraan jurnalisme lingkungan hidup perlu memperhatikan etika dan peraturan peliputan serta lima hal dasar yaitu;

1) informasi yang relevan dengan latar belakang kasus lingkungan, (2) materi berita yang sering menjernihkan situasi atau menjadi mediasi, (3) memperhatikan risiko pemberitaan dari kasus lingkungan hidup, (4) pengetahuan tentang lingkungan, dan (5) nilai budaya dari masyarakat atau kasus lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Abrar, Ana Nadhya (1993), Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup**.** Yogyakarta. UGM Press.

Anderson, Alison (1997), *Media, Culture, and Environment*. London. UCL Press.

Eriyanto (2002), Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta. LKiS.

Fajar, Arief (2011), Konstruksi Surat Kabar Harian *Kompas* Mengenai Lingkungan Hidup (Analisis *Framing* Dalam Penyajian Berita Banjir Citarum), Laporan Penelitian Reguler. Surakarta. Tidak Dipublikasikan.

Flournoy, Don Michael (1989), Analisis Isi Surat Kabar-Surat Kabar Indonesia. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Kovach, Bill dan Tom Rosentiel (2004), Elemen-Elemen Jurnalisme. Jakarta. ISAI.

Nasution, Zulkarimein (2007), Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan Penerapannya, Edisi Revisi. Jakarta. RajaGrafindo.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran.

Sumadiria, AS Haris (2005), Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita dan Feature. Bandung. Simbiosa Rekatama.

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers.